UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN KEUANGAN DAERAH UPT KOTA SOLOK

Tika Defitri, Elva Dona

Akademi Keuangan dan Perbankan "Pembangunan" Padang

tikadefitri@gmail.com

ABSTRACT

Local tax is a tax levied by local governments to finance local development. Among the types of local taxes are taxes on motor vehicles. Motor vehicle tax is a tax levied on the ownership and / or control of a motor vehicle. The formulation of the problem is taken is how the effort to increase local revenue through taxes on motor vehicles at the Regional Finance Agency UPT Solok. The purpose of this study to determine the efforts to increase local revenue through taxes on motor vehicles at the Regional Finance Agency UPT Solok. Methods of data collection using qualitative methods which are outlines the data and provide the facts the reality experienced by the existing theories regarding local revenue through taxes on motor vehicles at the Regional Finance Agency UPT Solok. To increase local revenue, Regional Finance Agency UPT Solok made some efforts such as Super PKB, Anywhere, and SAMSAT Keliling. The conclusions drawn from the study of Regional Finance Agency UPT Solok is able to generate income through tax revenues motor vehicle, as seen in the number of motor vehicle tax revenue value continues to increase every year.

Keywords: *local tax, vehicle tax*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan dalam rangka melaksanakan pembangunan, diperlukan ketersediaan dana pembiayaan yang besarsalah satu sektor penting dalam pendapatan negara ialah sektor pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pendapatan daerah yang merupakan penerimaan penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Fungsi pajak menurut lembaga atau instansi pemungutannya, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Bea Perolehan Hak Tanah atau Bangunan (BPHTB) dan Bea Meterai (BM), sedangkan pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan proyek-proyek lainnya. Saat ini sebagian besar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berasal dari sector pajak, demikian pula dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) penerimaan dari sektor pajak daerah termasuk penyumbang besar dalam penerimaan daerah, oleh karena itu perpajakan dapat dijadikan studi yang bermanfaat untuk dibahas dalam suatu penelitian.

Menurut Mardiasmo (2013:12) sesuai dengan undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, beberapa yang terkait dengan hal tersebut adalah daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMD) atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah dan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab memberikan keleluasaan kepada daerah kota atau kabupaten dalam mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya, pada dasarnya sumber utama pembiayaan pembangunan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan PAD lainnya.

Diantara jenis pajak daerah terdapat pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak daerah yang paling potensial maka perlu dilakukannya optimalisasi peningkatan pelaksanaan pemungutannya. Pemungutan PKB ini menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengetahui sejauhmana upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan dan besarnya peranan PKB terhadap PAD, maka penulis mengamati sejauhmana upaya penggalan potensi dari PKB

untuk lebih mengkonsentrasikan penelitian pada Badan Keuangan Daerah UPT Kota Solok.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan tempat pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan mengkaitkan pada pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), perpanjangan STNK dan pendaftaran STNK. Kantor Samsat UPT Kota Solok merupakan tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat Kota Solok. Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT tersebut, jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah kendaraan dan masyarakat yang membayar pajak sehingga terjadi peningkatan jumlah nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Perkembangan jumlah kendaraan dan nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor UPT Kota Solok terus meningkat dimana pada tahun 2014 terdapat 33.171 unit kendaraan jumlah ini meningkat menjadi 34.662 unit pada tahun 2015 sampai pada tahun 2016 menjadi 36.435 unit. Peningkatan ini berbanding lurus dengan jumlah penerimaan nilai pajak, dimana pada tahun 2014 tersebut bernilai lebih kurang 13 Miliar rupiah yang akhirnya meningkat lebih kurang 16 Miliar rupiah pada tahun 2016. Angka ini diperoleh dari kantor SAMSAT UPT Kota Solok, walaupun terjadi peningkatan, tapi ini masih perlu dimaksimalkan mengingat sangat pentingnya kontribusi pajak terhadap pembiayaan proyek pembangunan Kota Solok sehingga perlu upaya-upaya yang harus dilakukan oleh UPT Kota Solok supaya pembangunan di Kota Solok sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul adalah “Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Keuangan Daerah UPT Kota Solok”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode data kualitatif. Data kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat menguraikan data-data. Maka dari itu dengan metode ini penulis akan mencoba memberikan fakta-fakta atau kenyataan yang dialami dengan teori-teori yang ada mengenai pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor pada Badan Keuangan Daerah UPT Kota Solok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang merupakan penerimaan penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek serta kegiatan-kegiatan daerah seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan lainnya.

Pendapatan daerah termasuk sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah (Halim, 2004).

Menurut Damang(2011)Pendapatan daerah juga berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mana merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan daerah.

Salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara selain penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lainnya, penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun pendapatan daerah tidak seluruhnya dapat membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pajak

MenurutMardiasmo (2011) Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Muljono (2010) Pajak ialah kontribusi kepada negara dan terutang oleh wajib pajak yang wajib dibayar, dipotong, atau dipungut berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan imbalan tidak secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pajak ialah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan defenisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuranwajib rakyat yang dikontribusikan kepada negara berdasarkan undang-undang yang telah di tetapkan dan dapat dipaksakan dengan tidak dapat imbalan individual oleh pemerintah, dengan demikian pajak yang telah ditetapkan tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Menurut Pheni (2012)Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan, sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgetair)Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
 - b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
 - c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.
3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)
Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi Stabilisasi
Menurut Widyadhani (2011) Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi, sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menekankan kepada dua fungsi pajak yang pertama. Hal ini dinyatakan oleh lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2011) fungsi pajak juga berpedoman kepada dua fungsi pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- a. Fungsi Anggaran Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksannya pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat, dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kewajiban membayar pajak ialah suatu keharusan yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara sesuai dengan kemampuan ekonomi dari masyarakat atau sesuai dengan penghasilan dari masing-masing orang. Dalam penelitian ini kewajiban membayar pajak ditujukan pada wajib pajak atau orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan pula. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik wajib pajak. Proses ini dimulai dengan surat teguran dan dilanjutkan dengan surat paksa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban membayar pajak wajib pajak orang pribadi yaitu kesadaran-kesadaran membayar pajak

Menurut Supardi (2009) ada beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu:

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Kesadaran masyarakat rendah dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Menurut Ekawati (2013) salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan ialah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah ialah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten/kota. Penduduk yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, bukan untuk memenuhi kepentingan individu.

Menurut Ilhamsyah & dkk (2016) Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak dapat bersifat dipaksakan karena sudah diatur dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor ialah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggeraknya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan *off-road*, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata berada dalam ketentuan ini adalah terpasang pada

tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Pajak kendaraan bermotor ialah bagian pajak daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi. Menurut (Mohammad, 2003) objek dari pajak kendaraan bermotor ialah penguasaan kendaraan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Sejumlah besar pajak yang berlaku dan dipungut bagi daerah, salah satu diantaranya pajak kendaraan bermotor. Pajak ini termasuk golongan pajak langsung dan merupakan pajak lokal (daerah). Pajak kendaraan bermotor dipungut dari pemegang-pemegang kendaraan bermotor yang dihidupkan dengan generator gas arang atau memakai bahan bakar minyak tanah dan bensin atau juga yang tidak semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan bakar juga dikenakan pajak ini.

Selanjutnya dalam ordonansi pajak kendaraan bermotor tahun 1934 pasal 1 dikutipkan dengan nama pajak kendaraan bermotor, dipungut pajak karena memegang :

1. Kendaraan bermotor, yang digerakkan dengan motor yang dihidupkan dengan generator gas arang atau oleh yang memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin, terlepas dari hal apakah motor itu khusus diperuntukkan guna dipakai dengan minyak tanah atau dengan campuran minyak tanah dan bensin.
2. Segala kendaraan bermotor lainnya, yang tidak digerakkan oleh motor yang semata-mata memakai bensin sebagai bahan pembakar
3. Kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor yang semata-mata memakai bensin sebagai bahan pembakar tetapi mempunyai berat total yang diizinkan 5.500 kg atau lebih kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor dengan semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar, yang mempunyai berat total yang diizinkan 3.500 kg atau lebih.
4. Kereta tambahan (kereta gandengan) dari kendaraan bermotor.
5. Kendaraan bermotor seperti yang dimaksudkan dibawah berat total yang diperkenankan kurang dari 3.500 kg, kecuali yang telah dikenakan pajak rumah tangga atau yang dibebaskan dari pajak rumah tangga.

Memperhatikan tentang pajak kendaraan bermotor sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat ditarik beberapa patokan pokok, antara lain :

1. Pajak ini ditimbulkan oleh adanya kendaraan bermotor yang dimiliki.
2. Pajak dipungut dari pemilik kendaraan bermotor sebagai wajib pajak.
3. Penentuan besarnya beban pajak didasarkan kepada ukuran yang digariskan.
4. Kendaraan bermotor dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh.

Dalam pasal 1 angka (6) peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Kendaraan bermotor ialah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak (pasal 1 angka 7).

PEMBAHASAN

Pembahasan Pajak Kendaraan Bermotor

Kantor Samsat Badan Keuangan Daerah UPT Kota Solok merupakan tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT tersebut jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan, dari penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Kendaraan Dan Nilai Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor UPT Kota Solok
Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Perkembangan Jumlah Kendaraan (%)	Nilai penerimaan pajak (Rp)	Perkembangan Nilai (%)
1	2012	30.718	-	10.375.750.525	-
2	2013	32.142	32,042	11.650.514.150	11,65
3	2014	33.171	33,071	13.107.131.750	13,10
4	2015	34.662	34,562	14.151.702.900	14,15
5	2016	36.435	36,335	15.964.941.750	15,96

Sumber data :Data Olahan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, peningkatan yang tertinggi terdapat pada tahun 2015 ke 2016 dimana jumlah unit kendaraan meningkat sebesar 36,33%. Pada periode-periode sebelumnya jumlah unit kendaraan juga mengalami peningkatan pada kisaran 32,04% sampai 34,56%, begitupun dengan nilai penerimaan pajak dari tahun 2012 ke 2016 selalu mengalami peningkatan, lonjakan nilai penerimaan pajak yang paling tinggi yaitu terdapat pada tahun 2012 ke 2014 yakni dari 11,65% langsung meningkat 13,10%. Pada tahun berikutnya nilai penerimaan pajak dari kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan pada kisaran 14,15% sampai 15,96%. Peningkatan nilai pajak yang signifikan berasal dari peningkatan jumlah unit kendaraan yang ada di Badan Keuangan Daerah UPT Kota Solok.

Hal ini disebabkan karena semakin banyak jumlah kendaraan bermotor maka semakin banyak orang membayar pajak kendaraan bermotor sehingga terjadi peningkatan jumlah nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor Badan Keuangan Daerah UPT Kota Solok.

Berikut grafik yang memperlihatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun.

Gambar 1
Perkembangan Unit KendaraanBadan Keuangan Daerah UPT
Kota Solok Tahun2013-2016

Gambar 2
Perkembangan Nilai Pajak KendaraanBadan Keuangan Daerah
UPT Kota Solok Tahun 2013-2016

Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data dari tabel 1 diatas selalu terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh UPT Kota Solok, namun pada nilai penerimaan pajakBadan Keuangan Daerah UPT Kota Solok hanya mengalami sedikit

peningkatan yaitu rata-rata pertahunnya hanya meningkat sebesar 1%. Hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak yang lalai dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu Badan Keuangan Daerah UPT Kota Solok belum puas dengan keadaan ini, karna iuran pajak ini digunakan untuk pembangunan Kota Solok, sementara masyarakat wajib pajak masih saja kurang sadar akan kewajibannya dalam hal tersebut, terbukti dengan masih dilakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor kedepannya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan nilai pajak lebih meningkat lagi adalah dengan cara menjalankan kegiatan Super PKB, *Anywhere*, dan SAMSAT Keliling. Berikut penjelasan upaya yang dilakukan oleh UPT Kota Solok dalam meningkatkan nilai penerimaan pajak:

1. Super PKB

Super PKB yaitu Surat Peringatan Pajak Kendaraan Bermotor. Surat ini dikeluarkan sejak SAMSAT ini didirikan, gunanya untuk mengantisipasi masyarakat wajib pajak yang lalai dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta untuk memberi peringatan atau aba-aba kepada wajib pajak sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Jadi, wajib pajak lebih waspada untuk mengetahui tanggal jatuh tempo pajak kendaraannya.

2. Samsat Keliling

Samsat keliling ini mulai beroperasi di Kota Solok sejak awal tahun 2015 yang berguna untuk memudahkan masyarakat wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Pada operasi ini SAMSAT Badan Keuangan Daerah UPT Kota Solok melakukan jemput bola dengan menyediakan kendaraan satu unit mobil keliling. Kendaraan tersebut beroperasi pada hari Rabu untuk Kota Solok dimana tempat pelaksanaannya di Pasar Raya Kota Solok. Pada hari Kamis Samsat Keliling bertanggung jawab pada wilayah Kabupaten Solok. Dengan demikian masyarakat lebih mudah mengenali bus ini karena biasa *standby* pada tempat-tempat umum seperti Tugu Ayam Bakukuak Kayu Aro.

3. *Anywhere*

Anywereartinya dimana saja, maksudnya setiap wajib pajak bisa melakukan pembayaran pada SAMSAT ini meskipun wajib pajak tersebut memiliki seri kendaraan diluar Kota Solok. *Anywhere* ini dikeluarkan oleh SAMSAT Kota Solok sejak pertengahan tahun 2017, yang mana sebelumnya telah diterapkan terlebih dahulu pada Kota Padang dan Kota Bukittinggi pada awal tahun 2017, dengan adanya *anywhere* ini wajib pajak bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor lewat online, sehingga proses pembayaran bisa langsung dibayar pada Badan Keuangan Daerah UPT Kota Solok tanpa harus mengunjungi daerah dimana seri kendaraan tersebut terdaftar.

SIMPULAN

Setelah melakukan proses pembahasan dan menganalisa peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor penulis dapat menarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut: 1. UPT Kota Solok merupakan bagian Samsat yang awalnya bernama Dinas Pendapatan Daerah yang menangani Pendapatan Daerah. Kemudian dengan SK Gubernur NOMOR.821/23/003/BKD-2008 beralih menjadi

Badan Keuangan Daerah dan kemudian Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan tempat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sampai saat sekarang ini. 2. Pajak Kendaraan Bermotor, termasuk golongan pajak langsung dan merupakan pajak lokal (daerah), dipungut dari pemegang-pemegang kendaraan bermotor. 3. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor, Badan Keuangan Daerah UPT Kota Solok telah melakukan upaya-upaya seperti: a. Mengeluarkan Super PKB kepada wajib pajak untuk peringatan pembayaran pajak yang akan jatuh tempo. b. Adanya *Anywhere* ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki seri kendaraan diluar Kota Solok. Mereka bisa melakukan lewat via online, sehingga waktu pembayaran bisa langsung dibayar pada Badan Keuangan Daerah UPT Kota Solok. c. Samsat Keliling Pada proses ini perwakilan para pegawai Badan Keuangan Daerah UPT Kota Solok melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan cara mendatangi daerah-daerah yang terpencil di Kota Solok. 4. Berdasarkan upaya yang telah dilakukan, Badan Keuangan Daerah mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini terlihat pada jumlah nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah dan syariat islam kepada seluruh umat manusia. Dan terimakasih kepada dosen Buk Elva Dona, SE.ME selaku dosen pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa serta memberikan arahan-arahan serta saran dalam penyusunan artikel ini, Kepada keluarga besar AKBP STIE “KBP” PADANG, staf dosen dan karyawan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan serta bantuan selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan artikel ini. Ayah Darminus dan Ibu Adhi Sovia tersayang, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, 2012, Penerapan Pajak Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Diakses dari Hukum. Ub.ac.id (24 February 2014)
- Damang, S. (2011). Pengertian Pendapatan Daerah dan Definisi Klasifikasinya, 10–12.
- Dona, E. Aimon, H. Azhar, Z. (2013). Analisis Ekonomi Sektor Riil Dan Sektor Moneter Di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi 1 (2).
- Ekawati, F. (2013). Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor DISPENDA Sulawesi Utara.
- Halim. (2004). Pendapatan Daerah (56th ed.). Jakarta.
- Hidayati, R. R., & Marlius, D. (2018). Aktivitas Promosi Dalam Meningkatkan Dana Pihak Ketiga Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batang Kapas Pesisir Selatan. <https://doi.org/10.31227/osf.io/8dgnq>

- Ilhamsyah, R., & dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8, 1–9. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mardiasmo. (2011). Pajak Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Daerah. 120–124.
- Marlius, D. Putriani, I. (2019). Kepuasan Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tapan Cabang Painan Dilihat dari Kualitas Layanan Customer Service. *Jurnal Pundi*. Volume 3. No. 2. Hal.111-122. <https://doi.org/10.31575/jp.v3i2.151>
- Marlius, D. Ananda, F. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Website Akademik Terhadap Minat Kuliah di AKBK Padang. *Jurnal Pundi*, Vol. 03, No. 03. Hal. 191-204. <https://doi.org/10.31575/jp.v3i3.190>
- Marlius, D. (2018). Loyalitas Nasabah Bank Nagari Syariah Cabang Bukittinggi Dilihat Dari Kualitas Pelayanan. *Jurnal Pundi*. Volume 1. No. 3. Hal.12-22. <https://doi.org/10.31575/jp.v1i3.60>
- Marlius, D. (2018). Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Website Akademik Terhadap Kepuasan Mahasiswa Pada STIE “KBK”. *Jurnal Ipteks Terapan*. Volume 12. No. 2. Hal. 116-128. <http://doi.org/10.22216/jit.2018.v12i2.633>
- Mohammad, R. (2003). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. 7, 2.
- Muljono. (2010). Pajak Pendapatan Daerah dan Kontribusinya, 10–25.
- Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Pheni. (2012). Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan BEA Balik Nama, STNK Kendaraan Bermotor Bekas. Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan BEA Balik Nama, STNK Kendaraan Bermotor Bekas, (DEPOK), 2–7.
- Supardi, B. (2009). Kontribusi Pajak Daerah Dan Pengelolaannya. UU.No.14 tahun 1992 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- Widyadhani, S. (2011). Pajak Daerah Dan Fungsinya.98-100, (Jakarta)